**Praktik Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister city* di Bidang Perdagangan (Studi Kasus: Kota Bandung)**

**Pendahuluan**

Paradiplomasi merupakan singkatan dari *parallel diplomacy* yang dicetuskan oleh Panayotis Soldatos tahun 1980-an, mengacu pada makna ‘*the foreign policy of non-central governments’* (Mukti, Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora, 2015). Paradiplomasi diartikan sebagai suatu aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh entitas sub-nasional atau *sub-state* dengan mitra luar negeri (Alam & Sudirman, Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City, 2020). Sedangkan Alexander S. Kuznetsov mendefinisikan paradiplomasi sebagai

“*a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors* (Kuznetsov, 2015).

Pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan luar negeri, pemerintah lokal/daerah juga dapat terlibat dalam pelaksanaan praktik diplomasi, yang kemudian dikenal dengan instiah *parallel diplomacy* (paradiplomasi). Perkembangan dunia yang diakibatkan arus globalisasi, mendorong keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti pemerintah daerah, organisasi internasional, perusahaan multinasional, kelompok kepentingan, bahkan individu, terlibat aktif dalam kegiatan hubungan internasional. Negara tidak lagi mampu melindungi entitas di bawahnya tanpa adanya keterlibatan aktor-aktor tersebut (Alam & Sudirman, Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City, 2020). Diplomasi tradisional yang hanya melibatkan pemerintah pusat saat ini telah bergeser perannya, mendorong keterlibatan aktor *non-state*, termasuk pemerintah daerah. Menurut Michael Storper dalam buku Rodrigo Tavares, “*City-regions are the principal scale at which people experience lived reality”* (Tavares, 2016). Daerah seperti provinsi maupun kota adalah tempat masyarakat melakukan aktifitasnya, mengembangkan kegiatan ekonomi, budaya, dan politik. Di provinsi atau kota itulah masyarakat melakukan kegiatan realnya (Tavares, 2016).

Dalam praktik paradiplomasi, pemerintah darah, provinsi maupun kota/kabupaten, diberikan kewenangan untuk menjalin hubungan dengan mitra di luar negeri. Keterlibatan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan harus sejalan dengan tujuan politik luar negeri yang akan dicapai oleh pemerintah pusat. Praktik paradiplomasi tidak boleh menyimpang dari tujuan dan cita-cita negara. Paradiplomasi menyimpang apabila digunakan pemerintah daerah sebagai upaya melakukan sparatisme, praktik ini disebut protodiplomasi. Oleh sebab itu, perlu adanya kecermatan dalam melakukan paradiplomasi.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional. Peran pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat mencapai kepentingan nasionalnya melalui pembangunan daerah. Dalam hal ini, pengembangan daerah dapat mendorong percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam mencapai kepentingan nasional, sangat diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Di Indonesia lebih dari 30 kota dan kabupaten yang menjalin kerja sama dengan mitra di luar negeri. Salah satunya adalah pemerintah Kota Bandung, yang memiliki kerja sama dengan mitra di luar negeri paling banyak setelah Jakarta (Ayobandung.com, 2021). Bidang kerja sama yang dijalin oleh pemerintah Kota Bandung dengan mitra di luar negeri mencakup kerja sama di bidang ekonomi perdagangan, investasi, industri, pariwisata, IPTEK; bidang budaya termasuk pertukaran budaya, pendidikan, dan olahraga serta bidang administratif dan bidang lainnya. Jika dilihat berdasarkan bidang kerja samanya, bidang yang paling banyak dilakukan kerja sama adalah bidang perdagangan. Berikut grafik jumlah bidang kerja sama Kota Bandung dengan pihak mitra luar negeri:

**Grafik 1. Jumlah Kerja Sama Kota Bandung dengan Kota di Luar Negeri Berdasarkan Bidang (Ruang Lingkup) Kerja Sama**  
Sumber: kerjasama.bandung.go.id

Salah satu bentuk praktik paradiplomasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh kota dengan kota di luar negeri. Kerja sama ini sering disebut dengan *sister city* atau *twin city*. Di Indonesia, konsep *sister city* merujuk pada kerja sama pembangunan ekonomi, walaupun begitu, kerja sama bidang pendidikan dan budaya juga termasuk isu yang penting dalam kerja sama *sister city* (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022).

Menurut O’Toole, terdapat 3 tahapan dalam perubahan (evolusi) kerja sama *sister city,* yaitu *associative phase* (didasarkan pada persahabatan dan pertukaran budaya), *reciproactive phase* (didasarkan pada pertukaran pendidikan dan SDM) dan *commercial exchange phase* (didasarkan pada pembangunan ekonomi) (O'Toole, 2001). Pada artikel ini, akan dibahas mengenai kerja sama *sister city* kota Bandung, sebagai bagian dari praktik paradiplomasi, khususnya di bidang ekonomi perdagangan. Berdasarkan tahap evolusi *sister city* O’Toole, tahap *commercial exchange phase* adalah tahap lanjutan yang berkembang di kemudian hari setelah melewati *associative phase* dan *reciprocative phase*. Oleh karena itu, artikel ini mencoba melihat pada tahap *commercial exchange phase* khususnya di bidang perdagangan.

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh dengan bantuan teori atau konsep yang ada. Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi yang membahas mengenai kerja sama *sister city* Kota Bandung.

**Konsep Praktik Paradiplomasi**

Alexander Kuznetsov menekankan konsep paradiplomasi pada peran pemerintah daerah dalam urusan luar negeri. Paradiplomasi merupakan kegiatan yang melibatkan unit konstituen (wilayah) dari beberapa negara dalam urusan internasional (Kuznetsov, 2015). Paradiplomasi berfungsi sebagai sarana pembangun identitas dan kebangsaan serta mendefinisikan kepentingan secara lebih spesifik. Kepentingan yang spesifik yang dimaksud adalah kepentingan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam pembangunan bisa menjadi lebih signifikan dibandingkan jika melihat dengan sudut pandangan tradisional, yang melihat aktor negara sebagai satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional (Chung & Mascitelli, 2008).

Menurut Carnago, paradiplomasi adalah

*“….non-central governments’ involvement in international relations through the establishment of permanent or ad hoc contacts with foreign public or private entities, with the aim to promote socioeconomic or cultural issues, as well as any other foreign dimension of their constitutional competences.”*

Keterlibatan pemerintah lokal dalam urusan internasional didasarkan adanya kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal/daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Kewenangan pemeritah daerah dalam urusan luar negeri dibatasi oleh beberapa aturan seperti pemerintah daerah tidak boleh membuka kantor perwakilan di negara lain, bidang kerja sama harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, mendapat persetujuan DPRD, sejalan dengan pembangunan nasional, dan wajib berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Walaupun kewenangan daerah, namun, pemerintah pusat tetap terlibat dalam kerja sama ini. Keterlibatan pemerintah pusat berupa pemberian fasilitasi kerjasama, evaluasi dan juga monitoring. Adapun di tahap awal kerja sama, pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan penjajakan kerja sama luar negeri. Kedua, memberikan fasilitasi kerja sama dalam pembahasan Draft MoU sekaligus menyusun Draft MoU. Ketiga, pemerintah pusat selanjutnya melakukan pembahasan Draft MoU pada forum antar kementrian. Keempat, pemeritah pusat melakukan komunikasi dengan calon mitra kerja sama (kota atau provinsi). Terakhir, pemerintah menerbitkan surat kuasa (*full power*) untuk kemudian ditanda tangani oleh pejabat pemerintah kota yang namanya tertera dalam surat tersebut.

Dalam kerja sama ini, pemerintah pusat yang terlibat secara langsung adalah Kementrian Luar Negeri RI, Sekretariat Negara RI, Kementrian dalam Negeri RI, dan Kementrian/Lembaga yang terkait lainnya dalam kerja sama luar negeri ini.

Dalam kerja sama *sister city*, naskah atau dokumen dapat berupa LoI (*letter of Intent*), atau ditindaklanjuti sampai penandatanganan dokumen MoU (*Memorandum of Understanding*). LoI merupakan outline dokumen persetujuan antara dua belah pihak sebelum selesainya perjanjian (Irawati, 2016) dikenal juga sebagai surat pernyataan niat. LoI memuat judul, subjek kerja sama, maksud dan tujuan, ruang lingkup kerja sama, masa berlaku, serta tempat dan tanggal penandatanganan (Mukti, 2020). Sedangkan, MoU adalah dokumen yang lebih formal berupa format kontrak, yang isinya meliputi program payung yang direncanakan dalam kerja sama (Irawati, 2016).

**Praktik Paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Bandung**

Kota Bandung telah melakukan praktik diplomasi, dan menjadi kota pertama yang melakukan kerja sama *sister city*. Berdasarkan aktornya, praktik paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dibedakan menjadi dua yaitu kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Terdapat 14 kota di luar negeri dan kurang lebih 6 lembaga internasional yang menjadi mitra Kota Bandung sampai tahun 2017 (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2017). Beberapa lembaga internasional yang bekerja sama dengan Kota Bandung seperti Toyota Municipalyty Aichi Japan, JICA, PT. Cartenz Technologi, JSCA, Kawasaki, ADB Trampil, dan ADB Sigap (ComCat). Kerja sama dengan lembaga internasional ini dilakukan dalam ruang lingkup kerja sama teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kota dan penanganan lingkungan (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2017).

Praktik paradiplomasi Kota Bandung dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di bawah Sekretaris Daerah Kota Bandung. Kebutuhan untuk melakasanakan praktik paradiplomasi mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemerintah Kota Bandung sadar bahwa konsekuensi dari undang-undang tersebut menciptakan fungsi dan tanggung jawab baru untuk secara mandiri mengembangkan daerah masing-masing (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022) salah satunya dengan melakukan praktik paradiplomasi.

Berikut praktik paradiplomasi yang dilakukan Kota Bandung berdasarkan naskah atau dokumen kerja sama:



**Grafik 2. Jumlah Naskah atau Dokumen Kerja Sama Paradiplomasi Kota Bandung**   
Sumber: kerjasama.bandung.go.id

Jika dilihat pada grafik tersebut, kerja sama paradiplomasi kota Bandung sebagian besar sudah sampai pada tahap penadatanganan MoU, jumlahnya 14 dokumen, sedangkan LoI sekitar 11 dokumen. Artinya, sudah banyak kerja sama paradilomasi yang sampai pada tahap pembuatan kotrak dan program payung.

Kerja sama luar negeri dibutuhkan bagi daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Daerah dapat melakukan akselerasi pembangunan dengan meningkatkan kerja sama luar negeri, bertukar informasi bahkan teknologi dengan mitra di luar negeri. Setidaknya, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh daerah dalam kerja sama dengan mitra luar negeri, yaitu (Oetomo, 2010):

1. Kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan sesuai lingkup bidang kerja sama khusunya pengembangan ekonomi
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota dan masyarakat swasta serta pengembangan SDM
3. Mempercepat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak
4. Tukar menukar kebudayaan

Dalam implementasi praktik diplomasi, kerja sama Kota Bandung dengan mitra luar negeri mendorong daerah untuk terlibat aktif dalam kegiatan internasional seperti keikutsertaan Kota Bandung dalam program Europalia di Belgia, program *Cidap* 2017 di Equador, *Petaling Jaya International Folklore Festival 2014* di Malaysia, *Hwaseong Festival* di Korea Selatan, pengriman delegasi pada *International Leadership Academy* di Amerika Serikat, promosi pariwisata Bandung di Kota Fort Worth, pertukaran pemuda *Suwon Youth Foundation* tahun 2011 dan 2012, pengiriman tenaga magang perawat ke Jepang tahun 2022, dan berbagai kegiatan internasional lainnya. Selain keterlibatan pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan internasional, praktik paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung berupa program asistensi (bantuan), seperti program asistensi SES (*Senior Experten Service*) dari Jerman, pendampingan teknis ADB Sigap kepada Dinas PU, pemberian 20.000 masker dari mitra *sister city*, Suwon, Korea Selatan, dan 10.000 masker dari Liuzhou, Tiongkok dan berbagai program bantuan lainnya. Tidak hanya pemerintah kota, masyarakat sipil juga terlibat dalam kegiatan internasional ini.

Pertukaran informasi tentang pengalaman dan praktek, serta jalinan komunikasi yang baik dengan mitra luar negeri dapat menjadi sarana pembelajaran bagi Kota Bandung untuk berkembang. Keterlibatan masyarakat memperlihatkan bahwa manfaat dan dampak kerja sama dari praktik paradiplomasi ini tidak hanya dirasakan pemerintah daerah tetapi juga masyarakat.

**Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung di Bidang Perdagangan**

Praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dalam bentuk kerja sama *sister city* atau *twining city* atau *sister province*. *Sister city* dan *twining city* memiliki makna yang sama yaitu kota bersaudara atau kota kembar, sedangkan *sister province* berada di tingaktan yang lebih luas yaitu provinsi kembar. Penyebutan *sister city* popular di Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi “*Sister Cities Intrenatioal*/SCI” dan kota-kota aliansinya di berbagai benua (Oetomo, 2010). Sedangkan penyebutan *twining city* lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa yang tergabung dalam “*Council of European Municipalities and Regions*/CEMR” dan kota-kota aliansinya di berbagai benua (Oetomo, 2010). Sementara di Indonesia, kerja sama kota atau provinsi dengan kota atau provinsi di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan *sister city* dan *sister province* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota *(Sister city)* dan Antar Provinsi *(Sister Province)*.

Permendagri No. 1 tahun 1992 menyebutkan bahwa kerja sama *sister city* adalah hubungan kerja sama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri. *Sister city* digagas berdasarkan adanya kesamaan atau kemiripan karakteristik dua kota yang menjalin kerja sama. Karaktaristik tersebut memudahkan dalam mengembangkan potensi di masing-maisng kota/daerah. Selain itu, kota atau daerah juga harus memperhatikan beberapa hal berikut dalam menjalin kerja sama *sister city* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, yaitu adanya kesetaraan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi, dan peningkatan hubungan antar masyarakat (Mukti, 2013).

Kerja sama *sister city* yang dijalin kota Bandung pertama kali yaitu dengan Kota Braunscwieg, Jerman, pada 2 Juni 1960 (Mukti, 2013). Kerja sama tersebut sekaligus menjadi kerja sama *sister city* pertama dan tertua di Indonesia. Kerja sama *sister city* kedua dijalin dengan kota Fort Worth, Amerika Serikat pada April 1990. Pada tahun 2021, Kota Bandung telah menjalin kerja sama *sister city* dengan 14 kota di beberapa negara, jumlah tersebut menjadikan Bandung menempati urutan kedua sebagai kota dengan *sister city* terbanyak setelah Jakarta (Ayobandung.com, 2021). Berikut data kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan kota di luar negeri:

**Tabel 1. Daftar Kerja Sama *Sister city* Kota Bandung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kota dan Negara | Tahun | Bidang Kerja Sama |
| 1 | Braunscweigh, Jerman | 1960 | Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan, Program Peningkatan Sektor Pariwisata, Program Olah Raga, Pertukaran Pemuda, Kunjungan dan Ekonomi serta Perdagangan. |
| 2 | Fort Worth, Amerika Serikat | 1990 | Ekonomi, Perdaganganm Industri, Pariwisata, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Administrasi, Pemuda dan Olah Raga, dan Sosial Kemasyarakatan |
| 3 | Suwon, Korea Selatan | 1997 | Perdagangan, Pemuda dan Olah Raga, dan Investasi |
| 4 | Liuzhou, RRC | 2006 | Ekonomi, Perdagangan, Industri, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kesehatan, dan Ilmu Pengetahuan dan bidang lain yang dimungkinkan. |
| 5 | Petaling Jaya, Malaysia | 2015 | Ekonomi dan Perdagangan, Pariwisata, Kebudayaan, Pendidikan dan bidang lain |
| 6 | Yingkou, RRC | 2006 | Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Bidang Pemuda dan Olah Raga dan Ilmu Pengetahuandan bidang lain yang dimungkinkan |
| 7 | Shenzhen, RRC | 2017 | Pariwisata, Kebudayaan, Industri Tekstil, Industri MICE, dan bidang lain |
| 8 | Hamamatsu, Jepang | 2015 | Pertukaran stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan kota kreatif, pelatihan stakeholder yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan (konservasi), pengelolaan sampah, manajemen air bersih dan limbah, pertukaran kegiatan bisnis, dan pertukaran kerja sama di anatara Lembaga pendidikan dan penelitian kedua kota |
| 9 | Seoul, Korea Selatan | 2016 | Pertukaran best practise dlm bidang ekonomi perkotaan, perencanaan kota, transportasi perkotaan dan e-government; Bidang kebudayaan, seni dan pariwisata; Bidang Ekonomi dan Investasi, Pertukaran personel dan pelatihan jangka pendek |
| 10 | Kawasaki, Kanagawa, Jepang | 2014 | Alih teknologi lingkungan, pengembangan SDM dan Pertukaran informasi dan kerjasama antar lembaga akademik dan penelitian dalam bidang:   1. Manajemen limbah padat, 2. Manajemen air limbah 3. Manajemen kualitas udara 4. Manajemen energi 5. Teknologi transportasi 6. Bidang lingkungan hidup lainnya yg disepakati para pihak |
| 11 | Namur, Belgia | 2017 | Ekonomi dan Perdagangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 12 | Toyota City, Jepang | 2017 | Informasi dan Teknologi, Sistem Transportasi yang berkesinambungan, Aktifitas Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Reformasi Administrasi |
| 13 | Cotabato, Filipina | 2017 | Ekonomi dan perdagangan, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan |
| 14 | Cuenca, Equador | 2017 | Kesenian, Kebudayaan dan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, Ekonomi dan Perdagangan, Kerjasama Sosial dan Pendidikan, Pengelolaan Limbah |

Sumber: kerjasama.bandung.go.id

Seperti yang terlihat pada grafik di bab Pendahuluan, kerja sama *sister city* paling banyak dilakukan pemerintah Kota Bandung di bidang ekonomi perdagangan. Dari table di atas dapat dilihat pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama *sister city* di bidang perdagangan dengan kota Braunscweigh, Jerman; Fort Worth, Amerika Seikat; Suwon, Korea Selatan; Liuzhou dan Yingkou, Tiongkok; Petaling Jaya, Malaysia; Namur, Belgia; Cotabato, Filipina; dan Cuenca, Equador.

Implementasi kerja sama *sister city* bidang perdagangan Kota Bandung seperti melakukan promosi produk unggulan Kota Bandung, melakukan *business matching*, serta membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi, dan industri di Kota Suwon. Berikut uraian kerja sama *sister city* Kota Bandung dalam bidang perdagangan:

* 1. Promosi produk unggulan Kota Bandung

Hubungan kerja sama antara pemerintah Kota Bandung dengan kota-kota di luar negeri salah satunya ditujukan sebagai upaya mengenalkan produk asal Bandung ke luar negeri, seperti di Braunscweigh, Suwon, Petaling Jaya, Arab Saudi, Kwait, dan beberapa kota lainnya. Pemerintah mengajak para pelaku usaha untuk mengikuti bazar di luar negeri dalam even atau acara yang diadakan mitra di luar negeri. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun toko Little Bandung di beberapa kota seperti Soul, Petaling Jaya, Belgia, Cuenca, dan beberapa kegiatan pameran bazar di luar negeri. Tujuan dari toko Little Bandung ini untuk memasarkan produk-produk UKM asal Bandung di pasar domestik dan pasar internasional.

Little Bandung merupakan program yang dibangun oleh pemerintah daerah sebagai upaya menguatkan daya saing produk Bandung, mendorong partisipasi dalam rantai pasokan global sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam bisnis internasional dan berkontribusi pada ekonomi negara (Little.Bandung, n.d.). Terdapat 5 program dalam Little Bandung yaitu Little Bandung Mobile, Little Bandung Wall, Little Bandung Catalogue, Little Bandung Store dan Little Bandung F4bdg. Selain membuka toko Little Bandung, pemerintah Kota Bandung juga ikut serta dalam bazar atau pameran yang diadakan kedutaan besar Indonesia di luar negeri, sebagai upaya mempromosikan produk asal Bandung ke luar negeri.

* 1. Kegiatan *business matching*

Kegiatan *business matching* bertujuan untuk mempertemukan para pelaku usaha seperti penjual, *supplier*, dan investor dengan pembeli. Kegiatan ini dapat mendorong proses jual beli dan investasi, serta kegiatan bisnis lain. Kegiatan *business matching* dilakukan oleh pemda Kota Bandung dengan beberapa mitra seperti Suwon, Belgia, Yingkou, dan Penang.

* 1. Pusat Informasi Perdagangan, Ekonomi, dan Industri

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Bandung bekerja sama dengan Kota Suwon membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi, dan industri di Kota Suwon. Tujuan dari program ini untuk menghimpun informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dari para pengusahaan di Kota Bandung yang selanjutnya diinformasikan kepada para pembisnis di Kota Suwon (Alam & Sudirman, 2020)

Tahun 2021, nilai ekspor Kota Bandung mencapai 322,3 juta USD dengan volume ekspor mencapai 292,1 juta kg. Nilai ekspor terbesar yaitu pada komoditas pakaian jadi jumlahnya sekitar 132 juta USD atau sekitar 40,95 persen. Sedangkan volume eskpor terbesar yaitu pada komoditas obat-obatan dengan volume mencapai 169,4 juta kg.

Produk ekspor unggulan Kota Bandung berupa pakaian jadi, produk tekstil dan perhiasan logam. Ekspor produk unggulan ini didukung oleh banyaknya industri tekstil dan sumber daya manusia yang kreatif untuk menciptakan inovasi produk kerajinan. Di kota ini ada lebih dari 975 industri tekstil dan pakaian jadi yang menyerap lebih dari 5.758 tenaga kerja (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2021).

Strategi pemanfaatan kerja sama *sister city* dalam bidang perdagangan dapat dicapai dengan memaksimalkan potensi eskpor atas komoditas unggulan yang dimiliki Kota Bandung di negara-negara mitra. Pemerintah Kota Bandung juga berupaya mendorong kegiatan ekspor dengan meningkatkan daya saing produk (PPID Kota Bandung, 2016). Pemerintah kota Bandung memberikan pendampingan pada pelaku usaha khususnya UMKM yang difasilitasi The Australian Indonesia Center, mendorong pemanfaatan *e-commerce* di Kota Bandung, dan terus mendorong inovasi bagi industri kreatif yang ada di Kota Bandung.

**Kesimpulan**

Kerja sama *sister city* dalam praktik paradiplomasi penting dilakukan sebagai alat bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan mitra di luar negeri, sebagai sarana bertukar informasi, pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi, kegiatan bersama, dan juga program kerja sama bantuan. Kota Bandung telah melaksanakan praktik paradiplomasi, khususnya implementasi kerja sama *sister city* dengan beberapa kota di luar negeri. Implementasi kerja sama *sister city* dalam bidang perdagangan dilakukan dengan melakukan kerja sama pada promosi produk-produk asal Bandung di luar negeri, seperti dalam acara pameran (bazar) dan toko *Little Bandung*, mengadakan *business matching*, serta membanguan pusat informasi perdagangan, ekonomi dan industri.

**Daftar Pustaka**

Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 32.

Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *JIHI*, 45.

Ayobandung.com. (2021, Juli 14). *4 Tugu Sister City yang Ikonik di Kota Bandung* . Retrieved from Ayo Bandung: https://www.ayobandung.com/baheula/pr-79729298/4-tugu-sister-city-yang-ikonik-di-kota-bandung

Bagian Kerja Sama Kota Bandung. (2017). *Data Kerjasama Kota Bandung Dengan Pihak Luar Negeri Tahun 2017*. Retrieved from Bagian Kerja Sama Kota Bandung: http://kerjasama.bandung.go.id/dokumentasi/rekapitulasi/data-kerjasama-kota-bandung-dengan-pihak-luar-negeri-tahun-2017

Bagian Kerja Sama Kota Bandung. (2022). *Awal Mula dan Sejarah Kerjasama Sister City*. Retrieved from Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL): http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl

bantenprov.go.id. (2011). *HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.* Retrieved from Biro Pemerintahan Provinsi Banten: https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/upload/20110308095052-kerjasama-luar-negeri-oleh-pemerintah-daerah.pdf

Chung, M., & Mascitelli, B. (2008). THE ROLE OF SISTER CITY RELATIONSHIPS IN THE ENHANCEMENT OF TRADE: LATROBE CITY (AUSTRALIA) AND TAIZHOU (CHINA). *GBATA 2008 : Global Busines and Technology Association Tenth International Conference* (p. 235). New York: Global Business and Technology Association.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. (2021, Februari 15). *Tahun 2015 - Data Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil Mikro di Kota Bandung* . Retrieved from Portal Data Kota Bandung: http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/detail\_data/e3a8ac2a-75d9-490d-8d3d-58cfc9e7301c

Humas Jabar. (2021, Agustus 14). *Nilai Ekspor Jabar Tertinggi di Indonesia Semester I/2021* . Retrieved from Bappeda Provinsi Jawa Barat: http://bappeda.jabarprov.go.id/nilai-ekspor-jabar-tertinggi-di-indonesia-semester-i-2021/

Irawati, R. (2016, November 4). *Lokakarya (4) : Bentuk-bentuk Agreement Internasional*. Retrieved from Malangkucecwara International Relationship: https://mir.stie-mce.ac.id/2016/11/04/lokakarya-4-bentuk-bentuk-agreement-internasional/

Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy, Subnational Governments in International Affairs.* New York: Routledge.

Little.Bandung. (n.d.). *Little Bandung*. Retrieved from Little Bandung: https://littlebandung.co.id/

Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional Paradiplomacy: The Rise of Local Actor in International Fora. *The Politics*, 86.

Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia.* Sleman: The Phinisi Press.

Oetomo, A. (2010). *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City.* Retrieved from Adoc: https://adoc.tips/download/pengelolaan-perkotaan-lewat-skema-sister-city.html.

O'Toole, K. (2001). Kokusaika and lnternationalisation: Australian and Japanese Sister City Type Relationships. *Australian Journal oflnternational Affairs*.

PPID Kota Bandung. (2016, April 6). *Paket Kebijakan Ekonomi XI: Meningkatkan Daya Saing Nasional Dalam Pertarungan Ekonomi Global*. Retrieved from PPID Kota Bandung : https://ppid.bandung.go.id/9361/

Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and State as Global Players.* New York: Oxford University Press.